

BaKTI Highlight Januari - Februari 2017

Prototyping dan Uji Lapangan Konsep Transportasi Publik Kota Makassar

Pada September-November 2016, telah dilaksanakan studi lapangan dan workshop inovasi transportasi publik yang dicintai oleh masyarakat yang dilaksanakan oleh UNDP, UN Pulse Lab Jakarta, Yayasan BaKTI bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Makassar serta beberapa organisasi sosial dan kreatif lainnya. Dalam workshop bulan November 2016, 3 ide terpilih untuk melalui proses inkubasi. Ke tiga ide tersebut dimatangkan lagi melalui proses inkubasi - *prototyping* dan uji lapangan yang akan dilakukan oleh tim kerja bersama dengan UNDP, UN Pulse Lab Jakarta dan Yayasan BaKTI.

Proses *prototyping* dan uji lapangan, diawali dengan workshop yang dilaksanakan pada tanggal 1-2 Februari 2017 bertempat di kantor BaKTI. Pada kesempatan ini, dipaparkan mengenai 3 konsep transportasi yang diusulkan. Konsep pertama, **PASIKOLA** - Petepete Anak Sekolah. *Prototype* ini mengoptimalkan pete-pete yang sudah ada untuk digunakan sebagai angkutan khusus bagi anak-anak sekolah. Pasikola akan melalui trayek dari kawasan pemukiman ke sekolah-sekolah. Kedua, **Sistem Feeder Bajikia**, mengurai trayek utama yang padat dan mengarahkannya ke dalam pemukiman/kompleks perumahan. Di dalam pemukiman ini, pete-pete dan bentor mengambil penumpang lalu bertindak sebagai pengumpan penumpang yang berlokasi di Mall, pasar dan sekolah. Ketiga, *E-Nassami*, *prototype* ini berupa sistem informasi dan komunikasi transportasi publik di Makassar. Aplikasi ini dapat digunakan untuk melacak layanan transportasi umum Kota Makassar dan menyediakan panduan trayek Petepete di Makassar. Layanan ini juga akan menyediakan informasi edukatif mengenai bagaimana etika berkendara di jalan umum.

Workshop pada awal Februari 2017 tidak berhenti sampai disitu. Tim kerja dari Pasikola, Bajikia, dan E-Nassami melanjutkan kegiatan uji lapangan dalam proses inkubasi yang berlangsung selama bulan Februari sampai dengan Maret 2017. Selama proses inkubasi, tiga tim tersebut sepakat untuk mengintegrasikan 3 solusi ide tersebut menjadi 1 solusi untuk transportasi anak sekolah yang aman dan sarat dengan nilai edukasi. Sistem informasi E-Nassami akan menyediakan sistem *tracking* untuk memastikan keamanan anak-anak yang menggunakan Pete Pete Anak Sekolah (PASIKOLA). Solusi feeder akan memberi dukungan dalam menentukan basis penjemputan. Tim kerja dalam proses inkubasi ini sedang mengembangkan konsep program termasuk model bisnis dan juga mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk periode piloting/uji coba yang akan dilaksanakan pada bulan April/Mei 2017.

Pelayanan Langsung Pencetakan Akta Kelahiran Anak Rentan Di Kota Makassar

Sebagai upaya mendukung terwujudnya pencatatan kelahiran anak-anak rentan yang berada di beberapa lokasi target, BaKTI bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar melaksanakan Pelayanan langsung pencetakan Akta kelahiran tahap II bagi anak rentan yang berasal dari beberapa lokasi target pada tanggal 18 Februari 2017. Pada tahap II, Pelayanan langsung berupa pencetakan Akta kelahiran dan pencetakan Kartu Keluarga yang baru bagi Kepala Keluarga yang mengalami perubahan data, dilakukan di

Kantor Yayasan BaKTI. Akta Kelahiran yang tercetak pada tahap II sebanyak 307 lembar. Turut hadir pada kegiatan ini, Walikota Makassar Bapak Danny Pomanto yang menyerahkan langsung akta kelahiran ke beberapa anak rentan Kota Makassar.

Sosialisasi Program LANDASAN II Tingkat Provinsi dan Kabupaten

Pertemuan-pertemuan dengan Tim Teknis Provinsi:

a. Provinsi Papua

Pertemuan dengan Tim Teknis Provinsi Papua dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2017 di Kantor BAPPEDA Provinsi Papua. Pertemuan Tim Teknis ini didahului dengan pertemuan Tim Landasan II-BaKTI-KOMPAK dengan Kepala BAPPEDA untuk mendapatkan arahan tentang rencana dan lokasi implementasi Program LANDASAN II. Pertemuan Tim Teknis Provinsi Papua dibuka oleh Ketua BAPPEDA Provinsi Papua.

b. Provinsi Papua Barat

Pertemuan dengan Tim Teknis Provinsi Papua Barat dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2017, dihadiri oleh BAPPEDA, BPMK, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Topik utama pertemuan sama dengan Pertemuan Tim Teknis Provinsi Papua. Keputusan tentang kabupaten wilayah kerja Program Landasan di Provinsi Papua Barat sudah lebih dahulu dirundingkan dan disepakati oleh Tim Teknis Provinsi Papua Barat, sehingga Pertemuan tersebut hanya mengumumkan kembali 4 Kabupaten wilayah Program LANDASAN II.

Sosialisasi Landasan II di tingkat Kabupaten:

Tim Teknis Provinsi Papua dan Papua Barat, KOMPAK dan BaKTI LANDASAN II secara terpisah melakukan sosialisasi Program LANDASAN II di masing-masing provinsi, sekaligus membentuk Tim Teknis Kabupaten untuk Program LANDASAN II. Sosialisasi Program LANDASAN II di Provinsi Papua Barat dilaksanakan tanggal 6 Januari – 13 Januari 2017, dimulai dari Kabupaten Manokwari Selatan, Kaimana, Fakfak dan berakhir di Kabupaten Sorong. Sambutan dari Pemerintah Daerah di semua kabupaten di Papua Barat sangat entusiastik. Di Manokwari Selatan, Bupati membuka pertemuan sosialisasi dan sekaligus menandatangani Surat Komitmen untuk melaksanakan Program LANDASAN II.

Di Kaimana dan Fakfak, Bupati dan Wakil Bupati aktif mempersiapkan Tim Teknis dan dalam memilih distrik-distrik yang bisa memberi efek lebih besar ke distrik-distrik lain. Surat Keputusan Bupati untuk pembentukan Tim Teknis Kabupaten di kedua kabupaten tersebut sudah dibuat. Kedua kabupaten ini sudah terlibat dalam Program LANDASAN I, dan sudah memahami dengan baik tujuan dan cara kerja Program LANDASAN. Di Fakfak pemerintah daerah ingin mengintegrasikan program khusus Kabupaten, yakni Program *Gerbangkaca* (Gerakan Bangun Kampung Bercahaya), ke dalam Program LANDASAN II di distrik-distrik LANDASAN II.

BaKTI Highlight Maret - April 2017

Pertemuan Kepala BAPPEDA Provinsi Wil. Kerja Proyek Kemakmuran Hijau MCA-Indonesia

Upaya bersama menjaga dan memanfaatkan lahan gambut di Indonesia menjadi topik yang diangkat dalam Pertemuan Kepala BAPPEDA Provinsi Wilayah Kerja MCA-Indonesia di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa 14 Maret 2017. Sebanyak 7 perwakilan BAPPEDA Provinsi dari wilayah kerja Proyek Kemakmuran Hijau MCA-Indonesia, BRG, BAPPENAS dan beberapa mitra yang sudah melaksanakan program restorasi lahan gambut. Ketujuh perwakilan BAPPEDA tersebut berasal dari Provinsi Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Selain itu turut hadir dan memberi pemaparan Bapak Noviar, Kepala Kelompok Kerja Perencanaan BRG; Dr. Ir. Gellwyn Daniel Hamzah Jusuf, M.Sc, Deputy Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam BAPPENAS; serta Pungky Widi Arianto, Shut, MSc, PLT Kasubid Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam diskusi juga diulas beberapa tantangan penerapan kebijakan perlindungan dan pengelolaan gambut beserta rekomendasi solusi yang ditawarkan dalam bentuk policy brief yang ditulis oleh Dr. Ir. Baba Barus dan Dr. Ir. Suria Darma Tarigan, MSc. dari Konsorsium Perguruan Tinggi untuk Indonesia Hijau - Center for Sustainability Science, IPB Bogor. Selain itu, sharing Policy Brief yang berjudul Strategi Revegetasi dengan Spesies Indigen dalam Konteks 3R Aksi Restorasi Lahan Gambut yang ditulis oleh Prof. Rujito Agus Suwignyo, Dr. Munandar, dan Dr. Bastoni dari Konsorsium Perguruan Tinggi untuk Indonesia Hijau CoE Peatland Conservation and Productivity Improvement (PLACE) Universitas Sriwijaya, direkomendasikan agar kegiatan restorasi lahan gambut yang berbasis vegetasi dapat memperhatikan kondisi ekosistem yang ada pada saat ini dengan mengutamakan penanaman tanaman panan dan tahan kebakaran lahan.

Ulasan singkat mengenai Pertemuan Kepala BAPPEDA Provinsi Wilayah Kerja MCA-Indonesia dapat dibaca pada link berikut

<http://pengetahuanhijau.com/berita/pemanfaatan-dan-pelestarian-gambut-di-indonesia>

Launching Kabupaten Maros sebagai Kabupaten Layak Anak

Launching Kabupaten Maros sebagai Kabupaten Layak Anak, dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Maros yang dihadiri oleh Kepala Dinas BPPA Provinsi Sulawesi Selatan, Bupati Maros, Ketua DPRD Kabupaten Maros dan SKPD terkait, BaKTI melalui Program MAMPU bersama dengan organisasi kemasyarakatan dan Perusahaan Swasta telah bersepakat untuk memberikan kontribusi dalam hal menghadirkan Desa Peduli Perempuan dan Anak sebagai salah satu Indikator dalam Kabupaten Layak Anak (KLA).

Sementara itu, beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh sub office dan mitra BaKTI – MAMPU adalah advokasi untuk penyusunan Renstra Dinas BPPA Kabupaten Maros, tujuannya untuk

menyusun draft Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros, dilaksanakan di Kabupaten Maros, tanggal 10 – 18 Maret 2017.

Diskusi Kampung dengan melibatkan kelompok konstituen, masyarakat dan tokoh masyarakat yang ada di desa. Tujuan kegiatan untuk mendata persoalan-persoalan yang terkait dengan perempuan dan anak di masing-masing desa serta menyusun agenda advokasinya, kegiatan ini dilaksanakan dari Maret sampai dengan April 2017.

Pendampingan oleh Community Organizer (CO) ke Kelompok Konstituen untuk advokasi penerimaan pengaduan, penanganan pengaduan ke SKPD atau Instansi terkait, kegiatan ini dilaksanakan dari Maret sd April 2017.

Implementasi Komponen Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Proses Pemetaan Kecamatan telah dirampungkan di 33 dari 33 (100%) kecamatan sasaran, dan proses Sosialisasi di 31 dari 33 (94%) kecamatan. Begitupun proses Pemetaan Desa telah dirampungkan di 177 dari 203 (87%) desa sasaran, kegiatan fasilitasi awal telah dilaksanakan di 175 dari 203 (86%) desa, dimana 172 diantaranya (85%) telah merampungkan rangkaian fase awal dengan penetapan Kelompok Pengguna Layanan (KPL), Janji Layanan Guru dan Masyarakat, dan formulir penilaian layanan.

Sementara itu, hasil analisa survei baseline yang menunjukkan tingkat kehadiran guru di wilayah sasaran program adalah 75.05%. Survey awal (scoping survey) terkait pengaitan Tunjangan Profesi dengan kinerja guru yang disetujui oleh Kemdikbud dilaksanakan dari 27 April hingga 15 Mei 2017 di 100 sekolah (30 SD, 30 SMP, 30 SMA, dan 10 SMK) di wilayah urban/semi-urban di Tasikmalaya dan Banjar (Jawa Barat), Denpasar (Bali), Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Bima dan Dompu (NTB), Manggarai Timur (NTT), Manado dan Bitung (Sulawesi Utara). Survei awal ini didukung oleh pendanaan WB Education.

- Regulasi terkait Program Rintisan yang telah diterbitkan pada tingkat Nasional:
 - Permendikbud No. 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.
 - Kepmendikbud No 80 Tahun 2017 tentang Daerah Khusus tahun 2017.
 - Perdirjen GTK No 11788/B/HK/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Prioritas dalam Penyaluran Tunjangan Khusus Tahun Anggaran 2017.
- Regulasi yang sedang diproses untuk penerbitan:
 - Kepmendikbud No. 99/P/2017 tentang Program Prioritas dalam Pemberian Tunjangan Khusus Tahun 2017, dimana didalamnya disebutkan Program KIAT Guru sebagai salah satu program prioritas.

BaKTI Highlight Mei - Juni 2017

Forum Kepala Bappeda Provinsi Se-KTI XII

Forum Kepala Bappeda Provinsi Se-KTI kembali dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2017 di Hotel Sari Pan Pasifik, Jakarta. Kegiatan ini merupakan pertemuan yang ke-12 dengan tema “*Membangun Basis Pengetahuan untuk Siklus Kebijakan di Indonesia*” difasilitasi oleh Yayasan BaKTI, Forum KTI dengan dukungan dari Knowledge Sector Initiative. Pertemuan ini dihadiri oleh Bappeda Provinsi Papua, Papua Barat, NTT, NTB, Maluku, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah; Deputi Bidang Ekonomi Bappenas, Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan Bappenas; Ketua Pokja Forum KTI/Koordinator Forum Kepala Bappeda Provinsi Se-KTI/Sekda Provinsi Gorontalo; Koordinator dan anggota JiKTI, dan mitra pembangunan lainnya.

Pada pertemuan ini beberapa poin penting yang didiskusikan yaitu sektor pengetahuan sangat penting bagi KTI dipandang sebagai investasi, bukan sebagai *cost* dalam mengejar ketertinggalan KTI dalam perspektif jangka panjang pembangunan NKRI. Hanya saja, selama ini pemerintah daerah di KTI belum banyak memanfaatkan hasil riset perguruan tinggi.

Selain karena belum mampu menghasilkan hasil riset terapan dan masih terdapat ‘keraguan’ akan validasi data yang dihasilkan, juga belum mampu menghasilkan *policy recommendation* yang dapat diformulasikan sebagai kebijakan pembangunan daerah yang membumi dan dapat diaplikasikan oleh pemerintah daerah, selain permasalahan teknis yang seringkali berhadapan dengan proses politik dan aspek budaya lokal pada masing-masing daerah.

Pada Forum ini juga Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan menjelaskan mengenai *Knowledge Center* (KC) Bappenas. *Knowledge Center* mempunyai visi sebagai “hub” yang memfasilitasi pertukaran pengetahuan di Indonesia dan antara Indonesia dengan negara-negara lain dalam konteks Selatan-Selatan dan kerjasama Triangular.

Pembentukan KC ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan nasional berbasis pengetahuan yang mendukung tercapainya tujuan-tujuan pembangunan melalui pertukaran pengetahuan dan pembelajaran dan solusi yang mudah dalam penerapannya. KC juga akan berfungsi sebagai “perantara” pengetahuan dan solusi, serta sebagai “pusat belajar” melalui inventarisasi pembelajaran, publikasi dan praktik-praktik cerdas yang dapat secara mudah diakses dan informatif bagi beragam audiens. KC juga akan menjadi gudang informasi, pengetahuan dan praktik cerdas yang terintegrasi, tempat dimana berbagai pemangku kebijakan dapat mengakses praktik-praktik pembangunan.

Knowledge Fair AMPL

Knowledge fair AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) dilaksanakan oleh Pokja AMPL Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Unicef dan Yayasan BaKTI. Kegiatan ini didukung pula oleh Pokja AMPL Kabupaten serta lembaga-lembaga mitra pembangunan AMPL di Sulawesi Selatan. Ditampilkan juga praktik-praktik cerdas oleh pelaku-pelaku pembangunan AMPL yang dapat menjadi pembelajaran bagi stakeholder lainnya. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 30 Mei 2017 di Makassar, yang diikuti oleh 117 orang peserta.

Baik kabupaten target maupun non target menampilkan info grafis dan foto terkait inovasi dalam Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) pada Galeri Informasi. Selain Galeri Informasi, ada 5 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang turut berbagi praktik baik:

1. Bone, Kabupaten Sehat

Pada tahun 2015, Kabupaten Bone mengajukan diri sebagai kabupaten sehat dan telah diakui oleh pemerintah pusat. Pengakuan ini diperoleh berkat upaya yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat melalui gerakan-gerakan yang diinisiasi oleh masyarakat. Setiap rumah memiliki tempat sampah, di depan rumah sudah ada tempat untuk cuci tangan, setiap desa memiliki pojok rokok/lego-lego. Selain itu, masyarakat juga sudah mulai membenahi diri untuk tidak BABS. Di Bone kini sudah ada 30 desa/kelurahan yang diverifikasi untuk mendapat gelar ODF (Open Defecation Free). Berbagai sektor lain pun mengalami dampak positif dari gerakan masyarakat tersebut. Ada Gardu Poskin (Gerakan Terpadu Peduli Orang Miskin), gerakan masyarakat yang mengumpulkan gabah-gabah di waktu panen, ada Gempusi (Gerakan Peduli Masalah Gizi), Gemar Lidi (Gerakan Masyarakat Peduli Disabilitas), Gertak (Gerakan Ketahanan Pangan).

2. *Wash in School* di Kabupaten Luwu Utara

Melalui program ini, siswa akan menjadi agen perubahan minimal di lingkup sekolah dan lingkup masyarakat. Melalui kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sejak dini, kegiatan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) bukan lagi kegiatan yang dipaksakan, tetapi sudah menjadi budaya di sekolah-sekolah.

3. Perencanaan Partisipatif di Kabupaten Wajo

Kegiatan ini berawal dari program JICA Prima Kesehatan dengan Desa Siaga Prima Aktif. Di level desa, kepala desa menggugah masyarakat untuk membuat perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi sendiri program AMPL. Dengan keterlibatan masyarakat secara penuh, maka rasa memiliki masyarakat juga semakin besar.

4. BUMDes pengelolaan air bersih di Kabupaten Takalar

BUMDes ini hadir melalui inisiasi masyarakat dengan bekerja sama dengan pemerintah desa. Hadirnya BUMDes menjadi inspirasi bagi masyarakat, masyarakat terlibat langsung dalam pemasangan pipa dan kran. Masyarakat juga terlibat langsung dalam pengelolaan. Saat ini, BUMDes telah mempunyai pelanggan 198 rumah.

5. Pengelolaan Limbah di Kota Makassar

Sejak 2007 Makassar mulai merencanakan dan melaksanakan pembangunan terkait sanitasi dan limbah rumah tangga. Sejak periode itu pula mulai dicanangkan bagaimana mengatasi limbah di Makassar melalui pembangunan Ipal Komunal (pengelolaan air limbah bersama, dimana 1 unit pengelolaan bisa di pakai bersama antara 5-200 rumah). Inisiatif ini diikuti dengan regulasi serta pelibatan pemerintah kelurahan melalui sosialisasi dan meminta dukungan dari pemerintah untuk mendorong masyarakat dalam pembangunan infrastruktur pembuangan limbah sebagian besar yang dilakukan masih berbasis masyarakat.

Piloting PASIKOLA

Selama bulan Maret-April, tim kerja proses inkubasi juga mengembangkan konsep program termasuk model bisnis dan juga mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk periode piloting/uji coba yang dilaksanakan pada bulan Mei 2017.

Piloting/uji coba pertama dijalankan oleh 4 anggota tim dengan bekerja sama dengan Dishub Kota Makassar, Organda, Dinas Pendidikan dan difasilitasi oleh BaKTI. Empat anggota tim ini sebelumnya terlibat aktif pada workshop *Design Thinking* dan tahap inkubasi.

Beberapa kegiatan sebagai tahapan persiapan sebelum pelaksanaan Piloting 1.1:

- Modifikasi mobil
Dalam Piloting 1.1, tim Pasikola memodifikasi satu petepete regular menjadi angkutan anak sekolah. Pengerjaan mobil petepete itu melalui dua tahap: perbaikan *body* dan interior mobil. Item-item perbaikan *body* dan interior mobil berdasarkan masukan orang tua siswa dan siswa saat proses *prototyping* dan tahap inkubasi.
- Pelatihan pengemudi Pasikola – teori dan on the job training yang melibatkan Dishub Kota Makassar, Organda, psikolog anak, dan pengemudi angkutan antar jemput Athirah.
- Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Makassar
Dinas Pendidikan Kota Makassar merekomendasikan SMPN 3 Makassar dengan pertimbangan lokasi sekolah ini terletak di kawasan yang rawan macet. Dalam koordinasi ini juga Dinas Pendidikan Kota Makassar menghubungkan langsung ke pihak sekolah.
- Koordinasi dengan Pihak SMPN 3 Makassar
- Rapat Pemantapan Pasikola
- Pertemuan dengan Walikota Makassar
- Pertemuan dengan Orang Tua Siswa
- Cek lokasi rumah siswa dan rute penjemputan

Pada piloting 1.1, aplikasi sistem informasi E-Nassami Pasikola masih dalam proses pengembangan sehingga sistem *tracking* masih menggunakan *Se Tracker* dan *Google Maps* serta komunikasi via *Whatsapp* antara tim Pasikola, pengemudi dan orang tua siswa. Harapannya aplikasi E-Nassami Pasikola dapat digunakan pada piloting 1.3.

Pada tanggal 22 Mei 2017, Walikota Makassar juga melaunching Program Pasikola yang dirangkaikan dengan kegiatan Makassar City Expo.

BaKTI Highlight Juli - Agustus 2017

Diskusi Praktik Cerdas Bank Ikan – Pengawal Laut dari Tomia

Pada tanggal 25 Juli 2017 BaKTI melaksanakan Diskusi Praktik Cerdas Bank Ikan – Pengawal Laut dari Tomia di Balai *Pertemuan Nelayan* Pelabuhan Perikanan Nusantara Bastiong Ternate, Maluku Utara. Kegiatan ini terlaksana atas kerja sama Yayasan BaKTI dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara dan didukung oleh Pemerintah Australia melalui *Australian Alumni Grant Scheme* dan diadministrasi oleh Australia Awards di Indonesia. Pak Abas dan Saharuddin dari KOMUNTO (Komunitas Nelayan Tomia) berbagi cerita bagaimana nelayan di Tomia berdaulat, menjaga dan merawat lautnya dengan hati. Salah satu hal yang membuat nelayan di Tomia mau berkelompok dan berdaulat adalah karena ancaman terhadap sumber daya laut, selain itu bank ikan ini menjadi sumber ketahanan pangan nelayan. Bank Ikan di Tomia adalah wilayah tanpa bom ikan dan bius, inilah yang menjadi investasi dari nelayan. Ikan yang beranak pinak yg keluar dari wilayah bank ikan adalah bunga bank untuk nelayan. Diskusi ini dihadiri 54 peserta (perempuan: 28, laki-laki: 26) yang terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate dan Provinsi Maluku Utara, kelompok nelayan, akademisi, LSM, dan media.

Pada hari ke-2, tanggal 26 Juli 2017, para Pengawal laut dari Tomia berbagi praktik cerdas ke Kampung Nelayan Kalumata - Ternate. Diskusi di Kalumata berlangsung interaktif. Kelompok nelayan di sana sangat antusias mendengar pengalaman Pak Abas dan Pak Saharuddin membentuk KOMUNTO dan juga upaya membangun radio komunitas sebagai media pertukaran informasi dan pengetahuan antar nelayan. Menurut Kabid Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, akan diupayakan anggaran tahun depan untuk kunjungan belajar ke Tomia dengan membawa beberapa kelompok nelayan di Maluku Utara untuk belajar mengenai Bank Ikan dan pengorganisasian nelayan.

Forum Mitra Program MAMPU

Forum Mitra MAMPU yang kedua ini dilaksanakan pada tanggal 11-12 Juli 2017 bertempat di Hotel Alila Jakarta bertema “*Kepemimpinan Perempuan untuk Mengakhiri Pemiskinan Perempuan dan Ketimpangan Relasi Gender*”. Forum Mitra merupakan forum merawat kemitraan dan pertukaran pengetahuan, dengan berbagi pengalaman dan pengetahuan Program MAMPU fase pertama (2012-2016) dan transisi untuk memasuki fase kedua (2017-2020).

Perkembangan lainnya, pada hari Selasa 1 Agustus 2017 ‘Panitia’ Pengembangan Sosial Ekonomi – Keuskupan Atambua (PPSE-KA) dalam Program MAMPU-BaKTI bersama dengan Kepala Desa Leun Tolu dan Mama Maria Funan (Ketua KK “Husar Ida Binan Ida” Desa Leun Tolu) melakukan Advokasi Praktik Cerdas ke Bupati Belu. Bupati Belu Willy Lay menyambut baik praktik cerdas ini karena mendukung Visi-Misi Bupati untuk Revolusi Pertanian. Dalam kesempatan itu juga Bupati instruksikan untuk mengalokasikan dana desa guna mendukung praktik cerdas dan menjadikan Desa

Leun Tolu sebagai Desa Organik dengan menerapkan sistem Pertanian Alami. Untuk mendukung praktik cerdas ini, pada hari sabtu tanggal 5 Agustus 2017 Bupati Belu Willy Lay bersama Ibu Vivi Lay dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dr. Joice Manek, menabur Pupuk Kompos yang di siapkan oleh Kelompok Konstituen Desa Leun Tolu."Husar Ida Binan Ida". Pupuk tersebut adalah hasil dari adopsi praktik cerdas pertanian alami Desa Salassae-Bulukumba Sulawesi Selatan yang beberapa waktu yang lalu telah di share ke KK oleh Bpk. Armin Salassa yang bekerjasama dengan PPSE-KA dan Yayasan BaKTI melalui Program MAMPU.

Sosialisasi dan Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pendidikan

Sosialisasi ini dilaksanakan di tujuh Kabupaten daerah intervensi Landasan II (Sorong, Kaimana, Nabire, Boven Digoel, Manokwari Selatan, Fakfak dan Lanny Jaya). Kegiatan ini merupakan peningkatan kapasitas kepada semua unsur satuan Pendidikan di sekolah-sekolah dalam peningkatan mutu layanan Pendidikan Dasar. Kegiatan ini melibatkan 138 Sekolah Dasar dan menghasilkan 138 profil SPM untuk akreditasi sekolah. Total peserta yang mengikuti kegiatan di 7 kabupaten tersebut adalah 555 orang.

Kegiatan lainnya adalah Pelatihan dan Pendampingan Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK) yang dilaksanakan di Kabupaten Asmat, Sorong, Fakfak, Kaimana dan Boven Digoel pada periode ini merupakan sebuah pengenalan instrumen yang aplikatif yang diberikan kepada kader pemberdayaan kampung. SAIK dibuat berdasarkan sensus kampung dan dikembangkan sebagai sumber data dan informasi tingkat kampung dengan pelibatan warga secara partisipatif dan akuntabel.

SAIK dikelola oleh kader-kader kampung yang telah dilatih tersebut. Pelatihan dan pengembangan SAIK per kampung ini diharapkan dapat membantu kampung untuk membuat prioritas program kampung sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam bidang kesehatan, pendidikan dan HIV. Sampai saat ini telah dilatih dan didampingi sebanyak 101 Kampung dan 202 kader.

BaKTI Highlight September - Oktober 2017

Diskusi Praktik Cerdas Kisah Kapal Kalabia di Raja Ampat

Salah satu praktik cerdas yang telah diidentifikasi, didokumentasi dan dipromosikan oleh BaKTI adalah Kapal Kalabia di Raja Ampat. Sebagai lembaga yang berfokus pada pengelolaan pengetahuan, BaKTI memfasilitasi Diskusi Praktik Cerdas Kapal Kalabia di Ambon. Diskusi ini berlangsung pada tanggal 18 Oktober 2017 bertempat Ruang Rapat Lantai VI Kantor Gubernur Maluku. Diskusi ini dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Maluku, Ibu Dr. Frona Koedobo. Diskusi ini dilaksanakan di Ambon, Maluku karena Maluku merupakan wilayah kepulauan dan model belajar yang dikembangkan Kapal Kalabia di Raja Ampat memiliki potensi untuk diadopsi di Maluku. Menas Mambrasar, pengajar dari Yayasan Kalabia hadir berbagi inspirasi dengan pelaku pembangunan di Maluku. Diskusi di Kantor Gubernur Maluku ini dihadiri oleh 64 peserta, yang terdiri pemerintah kabupaten/kota di Maluku, pemerintah provinsi, LSM, komunitas, akademisi, sektor swasta, dan media. Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan dari Pemerintah Australia melalui Australian Alumni Grant Scheme dan diadministrasi oleh Australia Awards di Indonesia.

GK National Discussion – Simposium Nasional Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif dan Rakornas Percepatan Kebijakan Satu Peta

GK National Discussion - Simposium Nasional Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif yang dirangkai dengan Kegiatan Rakornas (Rapat Kerja Nasional) Percepatan Kebijakan Satu Peta merupakan kesempatan untuk menunjukkan hasil-hasil kegiatan percepatan kebijakan satu peta serta kegiatan perencanaan tata guna lahan partisipatif yang telah dilakukan oleh MCA-Indonesia. Rakornas ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Informasi Geospasial. Kegiatan ini dihadiri 417 peserta terdiri dari pemerintah provinsi seluruh Indonesia, kabupaten wilayah kerja Proyek Kemakmuran Hijau MCA Indonesia, Pemerintah Pusat, dan mitra pembangunan baik nasional maupun internasional.

Kegiatan ini mengangkat tema Menuju Satu Jaringan Geoportal Berbasis Kepastian Ruang Terintegrasi. GK National Discussion ini juga menjadi kesempatan yang baik untuk memperoleh masukan berharga dari para pemangku kepentingan kunci, termasuk pemerintah nasional dan daerah untuk kemajuan Proyek Kemakmuran Hijau dalam perjalanannya mencapai tujuan utama.

Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan ini dapat dilihat pada link berikut

<http://pengetahuanhijau.com/berita/tata-guna-lahan-partisipatif-untuk-mendukung-pembangunan-wilayah>

<http://pengetahuanhijau.com/berita/siaran-pers-satu-peta-untuk-mendukung-pembangunan-nasional>

Piloting 1.1 – 1.4 PASIKOLA

Piloting/uji coba dijalankan oleh anggota tim yang sebelumnya terlibat aktif pada workshop *Design Thinking* dan tahap inkubasi dengan bekerja sama dengan Dishub Kota Makassar, Organda, Dinas Pendidikan dan difasilitasi oleh BaKTI.

Tahap uji coba/piloting awalnya dalam 3 tahap yaitu:

Pilot 1.1: 1 kendaraan melayani 1 sekolah: SMPN 3

Pilot 1.2: 2 kendaraan: 1 kendaraan melayani 1 sekolah: SMPN 3
Tambahan 1 kendaraan melayani 1 sekolah: SDN Kompleks IKIP dan SDN IKIP 1

Pilot 1.3: 4 kendaraan: 2 kendaraan melayani 1 sekolah: SMPN 3
2 kendaraan melayani 1 sekolah: SDN Kompleks IKIP dan SDN IKIP 1

Tahap uji coba kemudian dilanjutkan pada bulan Oktober 2017 dengan perincian sbb:

Pilot 1.4: 4 kendaraan: 2 kendaraan melayani 1 sekolah: SMPN 3
2 kendaraan melayani 1 sekolah: SDN Kompleks IKIP dan SDN IKIP 1

2 kendaraan: melayani SDN Kompleks Sudirman Makassar

Guna memastikan layanan Pasikola bisa berlanjut dan memberi manfaat pada warga Makassar, pada tanggal 22 - 23 September 2017, bertempat di Kantor BaKTI diadakan *PASIKOLA SUSTAINIBILITY WORKSHOP* dan dibuka oleh Walikota Makassar, Ir. H. Mohammad Ramdhan Pomanto. Ada pun peserta berasal dari Dinas Perhubungan: Ka Dishub, Kabid Moda Transportasi, Kasie Transportasi Khusus, Staf Seksi Moda Transportasi, Eks Kabid Moda Transportasi yang terlibat sejak awal, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar dan Kabid Pendidikan Dasar, Ketua Organda Makassar, Tim Pasikola, BaKTI, UNDP Bangkok Regional Hub dan UNDP Indonesia, Bappeda Kota Makassar, Organisasi dan Tata Laksana Makassar.

Pada workshop ini tampil Bapak Dheny Setyawan, yang membantu pembentukan BLUD di Kawasan Konservasi Perairan Daerah Raja Ampat, beliau memaparkan langkah-langkah apa yang semestinya dilakukan dan apa-apa saja yang perlu dipersiapkan untuk pembentukan BLUD. Dalam diskusi mengemuka beberapa harapan akan keberlanjutan PASIKOLA dengan adanya manajemen yang professional untuk pengelolaan Pasikola. Peserta workshop keberlanjutan manajemen PASIKOLA ini kemudian menyusun *timeline* langkah-langkah apa yang akan dilakukan dalam persiapan pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) PASIKOLA. Dengan adanya BLUD PASIKOLA nantinya kebutuhan angkutan publik untuk anak sekolah akan terpenuhi sehingga warga yang selama ini menggunakan kendaraan pribadi dalam antar jemput siswa dapat beralih ke PASIKOLA. Hal ini bisa mengurangi kendaraan pribadi di jalan-jalan kota Makassar sehingga bisa mengurangi kemacetan, utamanya pada jam-jam tertentu yaitu pagi (saat masuk sekolah) dan siang/sore hari (jam pulang sekolah).

Implementasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

- Hasil penilaian bulanan sudah dikaitkan dengan pembayaran Tunjangan Khusus sejak April 2017. Mulai bulan Agustus 2017, seluruh 203 SD rintisan KIAT Guru serentak melaksanakan penilaian bulanan.
- Sebanyak 173 (100%) SD rintisan telah menyelesaikan rangkaian pertemuan amandemen di 5 kabupaten.
- Forum Peduli Layanan Pendidikan telah dilaksanakan di 25 dari 27 (93%) UPTD/UPPK/ Cabang Dinas.
- Sebagai bagian dari strategi keberlanjutan, penguatan terhadap kemampuan pemangku kepentingan untuk melaksanakan tupoksi yang sudah terbangun terkait

tata kelola dan kebijakan penilaian layanan pendidikan akan dilakukan dari tingkat desa hingga kabupaten. Kegiatan penguatan di tingkat desa akan berjalan di 203 SD hingga akhir tahun 2017. Metode penguatan bervariasi dan dilakukan secara formal maupun informal. Beberapa contoh jenis penguatan yang dilakukan adalah evaluasi setelah pertemuan bulanan, pelatihan di tingkat kecamatan terkait peran dan tanggung jawab dalam penilaian bulanan, dan advokasi terkait anggaran operasional Kader dan KPL dari Pemdes.

Implementasi Pembayaran berdasarkan Kehadiran atau Kualitas Layanan

- Per akhir September 2017, pembayaran Tunjangan Khusus Triwulan II telah dilakukan kepada guru penerima TK di 203 SD rintisan KIAT Guru.
- Sejumlah 94% dari alokasi TK bagi PNSD dan non PNSD telah dicairkan untuk pembayaran tri-wulan II.
- Dalam proses pembayaran TK Triwulan III, 3 dari 5 kabupaten sudah selesai verifikasi hasil penilaian TW III dan 1 (Manggarai Barat) dari 5 kabupaten proses penetapan oleh Dinas Pendidikan.

Aspek Tata Kelola & Regulasi

- Regulasi tingkat Desa yang mendukung keberadaan serta kegiatan Kader dan KPL adalah sebagai berikut:
 1. 197 (97%) dari 203 Kader dan KPL yang telah terbentuk sudah mendapatkan SK dari Pemerintahan Desa
 2. Dimana 142 (70%) dari 203 Kader dan KPL telah menerima dana operasional dari pemerintahan desa sejumlah Rp. 848.6 juta yang bersumber dari APBDes atau Dana Desa.

Aspek Penelitian

- Survei Kehadiran Guru telah dilakukan di semua 173 (100%) SD rintisan KIAT Guru. Analisa data direncanakan per akhir November 2017.
- Indikasi perubahan yang telah terjadi adalah: berdasarkan penilaian masyarakat, kehadiran guru telah meningkat dari 67,99 % sebelum pelaksanaan KIAT Guru menjadi 88,36 % pada bulan Juni 2017 dimana kualitas layanan guru pun dinilai menjadi lebih baik dari 56,48 % menjadi 90,64 %;
- berdasarkan hasil Tes Cepat Kemampuan Dasar Murid yang dilakukan oleh Kader dan KPL di bulan Juli-Agustus 2017, 40% murid sudah memiliki kemampuan Bahasa Indonesia dan Matematika sesuai dengan kelasnya dibandingkan pada saat survei awal di bulan Oktober-November 2016 dimana hanya 1% murid yang memiliki kemampuan Bahasa Indonesia dan 2% murid yang memiliki kemampuan Matematika sesuai dengan kelasnya; perubahan lainnya, sebelum KIAT Guru 15%
- murid belum mengenal huruf dan 8% murid belum mengenal angka. Sekarang, hanya 9% murid yang belum mengenal huruf dan 4% murid yang belum mengenal angka

BaKTI Highlight November - Desember 2017

Green Knowledge National Discussion

Event berskala nasional ini akan menampilkan hasil dan capaian yang diperoleh Proyek Kemakmuran Hijau MCA-Indonesia dan menjadi ajang bertukar pengetahuan di antara para pengambil kebijakan pembangunan pada tingkat nasional dan daerah, termasuk para *prominent figures*, praktisi dan pemerhati isu lingkungan hidup, akademisi, jurnalis, serta para penerima hibah Proyek Kemakmuran Hijau. Informasi dan pengetahuan yang dipertukarkan akan menjadi masukan yang relevan bagi proyek Kemakmuran Hijau.

Sekretaris Wali Amanat MCA-Indonesia, Ir. Kennedy Simanjuntak, MA dalam pembukaan menyatakan pentingnya menghormati inovasi – inovasi yang tumbuh di masyarakat; mengapresiasi upaya BaKTI yang telah mengumpulkan, mengemas dengan baik dan *sharing* banyak ide/pengalaman; mengharapkan akan tumbuh BaKTI-BaKTI lain di berbagai pelosok Nusantara yang akan menghasilkan *networking* untuk keberlanjutan inovasi-inovasi di masyarakat; serta mendorong semua pihak untuk terus melanjutkan *collecting* dan *sharing* pengetahuan.

Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan – Bappenas, Erwin Dimas SE, DEA, MSi menyampaikan bahwa Bappenas telah memiliki cikal bakal Knowledge Center (KC) yang berfungsi sebagai sebuah penyimpanan informasi, pengetahuan, dan praktik-praktik terbaik dalam pelaksanaan pembangunan. Bappenas akan terus memperkuat KC; melanjutkan pendokumentasian serta replikasi praktik cerdas termasuk yang dari MCA – Indonesia; serta perluasan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, dalam hal ini diharapkan BaKTI dapat terus membantu dalam *collecting*, mengemas dengan baik dan *sharing* praktik-praktik baik. Dengan kembalinya kewenangan Bappenas untuk mengontrol dan merencanakan pembangunan sampai level proyek, maka apabila ada praktik cerdas yang terbukti bisa dilakukan secara berkesinambungan, dapat dijadikan proyek prioritas nasional yang masuk dalam RKP (Rencana Kerja Pembangunan), didanai dan dialokasikan ke daerah-daerah yang sangat membutuhkan. Selain itu, replikasi praktik cerdas dimungkinkan untuk didanai melalui mekanisme DAK (Dana Alokasi Khusus), baik di kabupaten/kota maupun provinsi mengingat dalam DAK Penugasan, perencanaan sudah menunjuk lokasinya.

Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan ini dapat dilihat pada link berikut

<http://pengetahuanhijau.com/berita/gk-national-discussion-pasar-pengetahuan-di-akhir-tahun>

Pengembangan Strategi Pencatatan Kelahiran Anak (*Equity Focus*) di Kabupaten Gowa Makassar

Target pemerintah Kabupaten Gowa untuk mencapai 90% cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun pada tahun 2019 kini menjadi lebih realistis. Bahkan jika mencermati berbagai upaya yang diinisiasi oleh Dinas Dukcapil Gowa dalam dua bulan terakhir hal itu sangat potensial tercapai dalam tahun 2018. Progres saat ini, per 15 November mencapai 61.09 % dari 52.38% capaian pada bulan September 2017.

Mencermati status di atas, artinya saat ini terdapat 29% anak di Gowa yang belum terjangkau dan belum memiliki akte kelahiran. Mereka terpotret dan dipetakan berada di

daerah pedesaan dan dari keluarga rentan serta kelompok beresiko. Hal ini sama seperti yang dikeluarkan oleh SUSENAS tahun 2016 bahwa 62% anak yang tidak memiliki akta kelahiran berasal dari keluarga miskin (40% terbawah) dan 66% anak yang tidak punya akta kelahiran berasal dari daerah pedesaan.

Guna membantu Dinas Dukcapil Gowa menyelesaikan 29% selisih dari target itu, UNICEF bersama Yayasan BaKTI menggelar lokakarya sehari yang bertajuk Pengembangan Strategi Pencatatan Kelahiran (*Equity Focus*) di Kabupaten Gowa pada tanggal 15 November 2017 di Hotel Melia Makassar. Misi yang dibawa kegiatan ini adalah mewujudkan keadilan hak identitas hidup bagi semua anak dari kelompok masyarakat manapun dan dimanapun mereka berada. Tujuan khususnya pertama, mengembangkan pola kemitraan strategis yang lebih partisipatif antara Dinas Dukcapil dengan jejaring SKPD yang ada digaris depan (*frontline*) dan kelompok masyarakat yang mendukung pencatatan kelahiran bagi anak rentan di wilayah yang sulit terjangkau. Dan yang kedua, merumuskan model kerjasama partisipatif pencatatan kelahiran yang menjangkau anak yang rentan dan yang tidak memiliki akses pencatatan kelahiran.

Kegiatan lokakarya diikuti oleh 41 peserta terdiri dari Sub PPKB-Pembantu Pembina Keluarga Berencana dan PPKBD Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PP dan KB), Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas, Dinas PMD, Dinas Dukcapil, TSKS-Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan Peksos (Dinsos), Forum LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak), Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Gowa, dan Persatuan Mandiri Kusta (PERMATA) Gowa.

Launching SAID (Sistem Administrasi dan Informasi Distrik) Sentani Timur

SAID merupakan system data yang terintegrasi dan terkoneksi dari kampung sampai kabupaten dan merupakan sistem informasi yang terbuka (open source) untuk masyarakat desa serta pihak lain yang membutuhkan, SAID nantinya diharapkan menjadi informasi data valid dan terintegrasi yang dapat dijadikan sebagai basis perencanaan pembangunan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 November 2017 yang dihadiri oleh 108 orang. Acara ini dihadiri oleh Mnister Counsellor Kedutaan Besar Australia Fleur Davies, tenaga ahli deputy III staff ahli presiden, perwakilan Bappenas dan Pemda Kabupaten Jayapura.

Kunjungan Duta besar AWG (Ambassador of Women & Girls) Australia

Pemkab. Maros menerima kunjungan DR. Sharman Stone, Duta besar AWG (Ambassador of Women & Girls) Australia beserta rombongan yang sedang melakukan kunjungan kerja ke wilayah dampingan Program MAMPU di Sulawesi Selatan (Makassar, Maros dan Pangkep) untuk melihat sejauh mana pencapaian Program MAMPU yang di dukung oleh Pemerintah Australia. Rombongan diterima oleh Ketua DPRD Maros dan tim MAMPU-BaKTI. Ibu Lusia Palulungan selaku PM Mampu-BaKTI menyampaikan presentasi singkat tentang hasil kerja program MAMPU di Maros, dilanjutkan dengan Kadis PPPA Maros, Bpk. Muh. Idrus, dan APP DPRD Maros yang diwakili oleh Ibu Hj. Haeriah Rahman & Ibu Fitriyani memaparkan tentang pencapaian yang telah diraih oleh Kab. Maros selama pendampingan dari Program MAMPU. yakni dengan lahirnya beberapa kebijakan seperti Perda PAUD, KIBBLA dan pembentukan dinas khusus penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kegiatan program MAMPU – BaKTI di bulan Desember adalah Peringatan HAKTP di Kawasan Rusunawa, Kota Makassar tanggal 10 Desember 2017, tujuan untuk mengkampanyekan Percepatan Pengesahan RUU Kekerasan Seksual dan Perkawinan Anak

MELAYANI - Mengurai Permasalahan Perbaikan Layanan Dasar di Indonesia

MELAYANI adalah sebuah program yang mendukung pemerintah daerah untuk menggunakan pendekatan berbasis masalah atau persoalan dalam menanggulangi masalah-masalah layanan dasar dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan kapasitas yang dimiliki pemerintah daerah sendiri.

Program MELAYANI, yang didukung oleh Bank Dunia diujicobakan di lokasi-lokasi berikut ini selama satu tahun mulai Oktober 2017 sampai dengan September 2018 :

- Kabupaten Belu (NTT)
- Kabupaten Kubu Raya (Kalimantan Barat)
- Kabupaten Bojonegoro (Jawa Timur)

Tujuan MELAYANI adalah meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengidentifikasi, memahami dan mengatasi permasalahan layanan dasar dengan konsep “belajar sambil melakukan” (*learning by doing*). MELAYANI juga bertujuan untuk memahami sistem pemerintah daerah dalam mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan permasalahan terhadap layanan dasar, termasuk tantangan-tantangan yang mereka hadapi, proses mengidentifikasi solusi yang tepat dan melaksanakannya, dan proses penyusunan perencanaan dan anggaran saat ini.

MELAYANI bekerja berdasarkan beberapa pendekatan. Sebagian besar pendekatan program yang digunakan adalah pendekatan “Adaptasi Iteratif Berbasis Masalah” atau *Problem Driven Iterative Adaptation* (PDIA), *Deliverologi*, serta sebuah metode yang dikembangkan oleh Bank Dunia “Kajian Cepat dan Rencana Aksi” atau *Rapid Assessment and Action Plan* (RAAP).

Program MELAYANI didukung oleh:

- Pendamping (*Coach*)
Satu orang pendamping yang telah mendapatkan pelatihan dari Bank Dunia akan ditempatkan di setiap kabupaten uji coba selama 1 tahun untuk memfasilitasi pemerintah daerah dalam menggunakan pendekatan Program MELAYANI.
- Tim Pemerintah Daerah
Tim ini akan melaksanakan proses identifikasi masalah, pengumpulan data, analisa masalah, mengidentifikasi atau mengembangkan solusi yang tepat dan melaksanakannya secara efektif.
- Tim Bank Dunia sebagai mentor dari Program MELAYANI akan memberikan dukungan teknis kepada pendamping (*coach*) dan Pemerintah Daerah.
- BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia).
BaKTI adalah mitra Bank Dunia dalam mengelola operasional Program MELAYANI serta mendokumentasikan proses dan menyebarluaskan pembelajaran yang dipetik dari pelaksanaan program.